

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS
Nomor : W.21-HH.01.02-1701

Kepada : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
Dari : Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Hal : Kegiatan Diseminasi Layanan Perseroan Perorangan
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 21 Juli 2025

A. Latar Belakang

1. Untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia,
2. Perseroan Perorangan, pelaku UMK dapat mendirikan badan hukum dengan satu orang pendiri, memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha, dan mendapatkan berbagai keuntungan seperti akses ke permodalan dan program pemerintah
3. Untuk dapat mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-SP DIPA - 135.04.2.692069/2025 tanggal 2 Desember 2024.

C. Rincian Kegiatan

No	Rincian Kegiatan	Keterangan
1.	Nama Kegiatan	Diseminasi Layanan Perseroan Perorangan
2.	Tema Kegiatan	Usaha Mikro dan Kecil Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
3.	Hari / Tanggal	Kamis, 24 Juli 2025
4.	Waktu	10.00 s/d Selesai
5.	Tempat	Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB
6.	Sasaran	Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Mahasiswa, UMKM.

D. Narasumber and Moderator

No	Jabatan / Instansi	Materi
1.	Narasumber Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	Pentingnya Perpajakan Bagi UMKM
2.	Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB	Tata Cara Pendaftaran Perseroan Perorangan

E. Peserta

No.	Asal / Unsur Peserta	Jumlah Peserta
1.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak NTB	2
2.	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat	2
3.	Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat	2
4.	Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat	2
5.	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Mataram	2
6.	Dinas Peindustrian Kota Mataram	2
7.	Dinas Perdagangan Kota Mataram	2

8.	UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Mataram	6
9.	UMKM Binaan Dinas Perdagangan Kota Mataram	6
10.	UMKM Binaan Dinas Perindustrian Kota Mataram	6
11.	Mahasiswa Universitas Mataram	2
12.	Mahasiswa Universitas AL Azahar Mataram	2
13.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	14
	Jumlah	50

F. Panitia

No.	Nama	Jabatan	Tugas Kepanitiaan
1.	I Gusti Putu Milawati	Kepala Kantor Wilayah	Pengarah
2.	Farida	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Penanggungjawab
3.	Puri Adriatik Chasanova	Kepala Bidang Pelayanan AHU	Ketua Panitia
4.	Yulia Asmarani	Pelaksana	Sekretaris
5.	Rahmi Istiharrah	Pelaksana	Anggota
6.	Heru Iswandi	Pelaksana	Anggota
7.	I Nengah Bambang	Pelaksana	Anggota

G. Rundown Kegiatan

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.00 – 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 – 09.45	Pembukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Diperdengarkan Mars Kementerian Hukum 2. Pembukaan MC 3. Laporan Ketua Panitia 4. Sambutan, Pembukaan, Pengarahan dan Penguatan Kepala Kantor Wilayah

		5. Foto Bersama 6. Penutup
09.45 – 10.00	COFFEE BREAK	
10.00 – 11.30	Pentingnya Perpajakan Bagi UMKM	Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
11.30 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	
12.00 – 12.30	ISHOMA	
12.30 – 14.30	Tata Cara Pendaftaran Perseroan Perorangan	Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB
14.30 – 15.00	Diskusi dan Tanya Jawab	
15.00 – 15.30	Kesimpulan	Moderator / Panitia
16.00	Penutupan	Panitia



LAMPIRAN

Nota Dinas Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Nomor : W.21-HH.01.02-1701

Tanggal : 21 Juli 2025

TERM OF REFERENCE (TOR)

1	Nama Kegiatan	Diseminasi Layanan Perseroan Perorangan
2	Tema	Usaha Mikro dan Kecil Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
3	Pelaksana/Organiser	Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum NTB
4	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Tanggal : Kamis, 24 Juli 2025 Waktu : 10.00 Wita s.d Selesai Tempat : Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB
5	Gambaran Umum Kegiatan	Sehubungan program kerja dan target kinerja Divisi Pelayanan Hukum khususnya Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB.
6	Output yang diinginkan	1. Untuk memberikan informasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil tentang Perseroan Perorangan. 2. Untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia.
7	Outcome yang diinginkan	Untuk dapat berkontribusi membangun Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Barat pada khususnya.
8	Acara Kegiatan	Diseminasi Layanan Perseroan Perorangan
	Pembiayaan	Biaya dibebankan oleh DIPA Kanwil Kumham NTB Nomor SP Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor:SP DIPA - 135.04.2.692069/2025 tanggal 2 Desember 2024 Program : 5251.BAH.001 Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah 056. D. Sosialisasi/ Diseminasi/ FGD/ Rakor/ Seminar/ Workshop/ Pendalaman Materi Layanan Kenotariatan (Rp. 11.800.000) Akun : 521211 Belanja Bahan (Rp.10.900.000) Kudapan (50 org x Rp. 18.000 x 1 kgt) =Rp.900.000,- Makan (50 org x Rp. 50.000 x 1 kgt) = Rp. 2.500.000,- Seminarkit (50 org x Rp. 150.000 x 1 kgt) =Rp. 7.500.000,- Akun : 522151 Belanja Jasa Profesi (Rp. 900.000) Honor Narasumber Eksternal (1 org x 2 jam x 1 kgt x @Rp.450.000) = 900.000,-



Farida